

Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara

Development of Central Java's Northern Coast Based on Local Infrastructure: Case Study of Jepara Regency

Kurniawati Hapsari Ekosafitri^{1*}, Ernani Rustiadi² & Fredinan Yulianda³

¹Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680; ²Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W)-LPPM Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor 16127; ³Program Studi Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Lautan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680;

*Penulis korespondensi. e-mail: hapsari.wirjosoepto@gmail.com

(Diterima: 3 Februari 2017; Disetujui: 16 Mei 2017)

ABSTRACT

Regencies in the northern coast of Central Java must transform their development priorities, based on their local potential resources and optimize their new sources of growth. Jepara, a coastal regency located in northern coast of Central Java province, has a coastline of 82.73 km and 16 sub-districts consisting 9 coastal sub-districts and 7 inland sub-districts. The concentration of population in coastal areas causes the coastal sub-districts to be more developed than the inland sub-districts. The objectives of this study were (1) to analyze the level of sub-districts' development based on their infrastructures and facilities and (2) to analyze stakeholder perception on coastal area development of Jepara. The methods used for analysis were scalogram analysis method and AHP (Analytical Hierarchy Process). The result of study showed that Kedung, Jepara, Keling and Karimunjawa sub-district are coastal sub-districts with level I on hierarchy which means they are high development areas. The result of stakeholder perception analysis showed infrastructure availability as the main priority for coastal area development, nautical tourism as the main activity that shall be developed in coastal regions, and Karimunjawa sub-district as the main priority for development in Jepara regency.

Keywords: Analytical hierarchy process (AHP), coastal area, coastal development, scalogram

ABSTRAK

Kabupaten-kabupaten pesisir di pantai utara Jawa Tengah perlu mentransformasi prioritas pembangunan pada potensi sumber daya lokal dan mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan baru di wilayahnya. Jepara, salah satu kabupaten pesisir di pantai utara Provinsi Jawa Tengah, mempunyai panjang garis pantai 82.73 km dengan 16 kecamatan yang terdiri atas 9 kecamatan pesisir dan 7 kecamatan pedalaman. Konsentrasi penduduk di wilayah pesisir menyebabkan perkembangan kecamatan pesisir lebih maju dibandingkan dengan kecamatan pedalaman. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis tingkat perkembangan kecamatan berdasarkan kelengkapan infrastruktur wilayah dan (2) menganalisis persepsi *stakeholder* mengenai pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis skalogram dan AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Hasil analisis tingkat perkembangan kecamatan berdasarkan kelengkapan infrastruktur wilayah menunjukkan bahwa Kecamatan Kedung, Kecamatan Jepara,

Kecamatan Keling dan Kecamatan Karimunjawa mempunyai tingkat perkembangan wilayah yang cukup tinggi. Keempat kecamatan pesisir tersebut termasuk dalam hirarki wilayah I. Hasil analisis persepsi *stakeholder* mengenai pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur dianggap merupakan prioritas utama pengembangan kawasan pesisir, pariwisata bahari merupakan prioritas kegiatan yang perlu dikembangkan di kawasan pesisir, dan Kecamatan Karimunjawa merupakan kecamatan yang diutamakan dalam pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Jepara.

Kata kunci: *Analytical hierarchy process* (AHP), wilayah pesisir, pengembangan pesisir, skalogram

PENDAHULUAN

Wilayah adalah satu satuan atau unit geografis dengan batas-batas tertentu, di mana bagian-bagiannya (sub wilayah) satu sama lain tergantung secara fungsional. Pada konsep wilayah nodal, wilayah ditafsirkan sebagai sel hidup yang mengandung inti dan plasma (Rustiadi *et al.*, 2011). Inti adalah pusat atau kutub yang berfungsi sebagai pusat konsentrasi tenaga kerja, lokasi industri dan jasa serta pasar bahan mentah, sedangkan plasma adalah wilayah belakang (*hinterland*) yang berfungsi sebagai pemasok tenaga kerja, pemasok bahan mentah serta pasar dari industri dan jasa.

Menurut definisi, pengembangan wilayah merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah (Adisasmita, 2008). Rustiadi *et al.* (2011) menyatakan skala prioritas diperlukan dalam suatu perencanaan pembangunan karena keterbatasan sumber daya yang tersedia. Pengembangan wilayah menempatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya sebagai subyek utama pembangunan.

Luca (2015) berpendapat pembangunan daerah (kabupaten atau provinsi) juga membutuhkan peran pemerintah pusat pada era desentralisasi sekarang ini. Wujud peran pemerintah pusat dalam meningkatkan perekonomian daerah dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut: a) pemberian insentif untuk menstimulasi investasi pada suatu wilayah; b) menetapkan kebijakan yang mampu menahan investasi publik untuk pengembangan

infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah; c) menggerakkan mekanisme administrasi dan legislatif yang berguna untuk perkembangan bisnis ke arah yang lebih baik. Tingkat pengembangan ekonomi regional juga dapat digunakan untuk melihat hubungan antara pertumbuhan pendapatan masyarakat sebagai konsumen dan pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan konsumsi (Arhipova dan Paura, 2015). Hal ini dikarenakan pembangunan suatu wilayah bukan hanya terbatas pada pengembangan ekonomi yang berorientasi produksi namun juga mengoptimalkan pendapatan setiap lapisan masyarakat (Fanni *et al.*, 2014).

Kebijakan pengembangan wilayah juga dapat dilakukan melalui pengelompokan wilayah. Pengelompokan wilayah merupakan alat untuk menganalisis pengembangan wilayah berdasar keunggulan sektor di wilayah tersebut. Pengelompokan wilayah berdasarkan sektor unggulan wilayah dapat menjadi penentu kebijakan dalam pengembangan suatu wilayah (Fundeanu, 2015). Variabel lain yang digunakan dalam pengelompokan wilayah adalah kelengkapan infrastruktur. Kelengkapan infrastruktur di suatu wilayah akan membawa investasi dari luar masuk ke dalam wilayah tersebut (Alecsandru dan Raluca, 2015). Ketersediaan infrastruktur juga memiliki keterkaitan ke belakang yang lebih tinggi daripada keterkaitan ke depannya yang berarti ketersediaan infrastruktur lebih mampu mendorong pertumbuhan sektor hulu dibandingkan dengan sektor hilir sehingga infrastruktur mempunyai peranan penting dalam

perkembangan ekonomi wilayah (Permana dan Asmara, 2010).

Kawasan pesisir mempunyai potensi pembangunan yang sangat tinggi, potensi tersebut antara lain: 1) sumber daya yang dapat diperbaharui (hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut dan sumber daya perikanan laut); 2) sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, terdiri atas sumber daya mineral dan geologis; jasa-jasa lingkungan misalnya *environmental service* (kawasan perlindungan dan sistem penyangga kehidupan), pariwisata, transportasi, dan sumber energi. Perencanaan pengembangan pesisir dan pembangunan wilayah pesisir memerlukan perhatian yang cukup serius agar kerusakan wilayah pesisir sebagai contoh akibat pembukaan lahan untuk budi daya udang di tambak secara intensif dengan membuka hutan mangrove seperti di wilayah pantai utara Jawa tidak terulang lagi (Harahab, 2010).

Kerusakan ekosistem mangrove di wilayah pantai utara Provinsi Jawa Tengah menyebabkan kerusakan pantai secara fisik maupun biologis yang berakibat pada menurunnya daya dukung pantai sehingga mengancam kelangsungan sistem wilayah pantai dan kelangsungan hidup masyarakat pesisir secara ekonomi, sosial dan lingkungan (Zikra, 2009). Ketidakseimbangan antara tingkat pemanfaatan sumber daya pesisir dan kerusakan yang ditimbulkan akibat dari kondisi tangkap lebih (*over fishing*), menurunnya kualitas air untuk budi daya tambak akibat pencemaran polutan hasil aktifitas industri, kegiatan rumah tangga, pertanian serta limbah minyak dari pencucian kapal di wilayah pesisir (Ariyanto, 2013), degradasi fisik habitat pesisir (mangrove dan terumbu karang) yang mengakibatkan abrasi pantai merupakan permasalahan dari pembangunan pesisir (Effendy, 2009). Aktivitas manusia di wilayah pesisir, membuka ekosistem mangrove sebagai pelindung alami pantai untuk pertambakan, menimbulkan kasus abrasi pantai akibat dari alih fungsi ekosistem mangrove menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan oleh nelayan pesisir Jepara bagian selatan sebagaimana penelitian Redjeki (2013) di desa

Kedungmalang, kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

Dampak pemanasan global menyebabkan kenaikan permukaan air laut semakin menambah kerentanan di wilayah pesisir (Joetidawati, 2016). Kasus banjir rob di kawasan pesisir Tambak Lorok Kota Semarang akibat dari kenaikan permukaan air laut salah satunya disebabkan oleh kerusakan kawasan pesisirnya (Kumalasari, 2014). Kumalasari (2014) menyatakan banjir rob berdampak pada kerusakan infrastruktur dan mengancam kondisi sosial ekonomi masyarakat di Tambak Lorok akibat tenggelamnya tambak rakyat, kerusakan rumah, dan kerusakan jalan. Permasalahan pembangunan pesisir lainnya yaitu kesenjangan pendapatan antara pelaku perikanan skala kecil dan pelaku perikanan skala besar mengakibatkan kemiskinan nelayan kecil di pantai utara Jawa Tengah yang semakin diperparah dengan *over capacity* karena banyaknya kapasitas perikanan tangkap (jumlah nelayan, kapal penangkap ikan, dan alat tangkap) yang beroperasi di Laut Jawa (Pramudyanto, 2014). Kemiskinan yang dialami sebagian nelayan di pantai utara Jawa Tengah secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh perilaku nelayan yang mengambil terumbu karang untuk bahan bangunan sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah ikan hasil tangkapan karena rusaknya habitat tempat ikan berkembang biak (Agunggunanto, 2011).

Pembangunan wilayah pesisir perlu memperoleh perhatian yang cukup karena aset serta sumber daya pesisir dan lautan mempunyai potensi yang besar untuk mendukung pembangunan nasional. Pengetahuan mengenai “batasan ekologis” menjadi dasar perencanaan dan pengelolaan pembangunan sumber daya wilayah pesisir dan lautan yang berkelanjutan. Waluyo (2014) menyatakan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dilaksanakan dengan memadukan empat aspek yaitu: a) keterpaduan wilayah secara ekologis; b) keterpaduan antar sektor kesinambungan; c) keterpaduan disiplin ilmu; d) keterpaduan *stakeholder* baik pemerintah, pihak swasta/investor, masyarakat pesisir, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Menurut Nugroho dan Dahuri (2012), alasan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan harus memenuhi kaidah keberlanjutan (*sustainability*) adalah sebagai berikut: 1) komponen hayati dan non hayati dalam wilayah pesisir membentuk suatu ekosistem yang kompleks hasil dari ragam biofisik (ekologis) yang rentan terhadap perubahan yang disebabkan kegiatan manusia maupun bencana alam; 2) wilayah pesisir mempunyai ragam ekologi maupun keuntungan lokasi (*location advantage*) biasanya ditemukan beragam pemanfaatan untuk keperluan pembangunan seperti budi daya tambak, perikanan tangkap, pariwisata serta industri atau permukiman; 3) wilayah pesisir pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat (orang) yang mempunyai keterampilan atau keahlian dan kesenangan (*preference*) bekerja yang berbeda sebagai nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, serta bekerja di sektor industri dan kerajinan; 4) secara ekologis dan ekonomis, pemanfaatan pesisir secara monokultur (*single use*) sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha, sebagai contoh pembukaan hutan mangrove menjadi tambak udang; 5) wilayah pesisir dan laut umumnya merupakan sumber daya milik bersama (*common property resources*) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Oleh karena itu pemanfaatan wilayah pesisir dan laut memerlukan perencanaan dan pengelolaan secara serius dari pemerintah, masyarakat, dan *stakeholder* yang berkepentingan di dalamnya.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten pesisir yang terletak di pantai utara Provinsi Jawa Tengah dengan garis pantai sepanjang 82,73 km. Pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana pendukung di semua kecamatan pesisir. Kelengkapan sarana prasarana di tiap wilayah kecamatan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Identifikasi terhadap jumlah serta ketersediaan prasarana dan sarana wilayah perlu dilakukan untuk menganalisis tingkat perkembangan kecamatan di Kabupaten

Jepara agar perencanaan pengembangan wilayah tepat berdasarkan kebutuhan tiap kecamatan.

Pelaksanaan pembangunan yang berbeda porsi menyebabkan perbedaan tingkat perkembangan wilayah di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Jepara. Perkembangan kegiatan perekonomian di wilayah kecamatan pesisir menyebabkan wilayah kecamatan pesisir lebih maju dibandingkan dengan wilayah kecamatan pedalaman. Konsentrasi penduduk di wilayah kecamatan pesisir menyebabkan lebih beragamnya fasilitas pelayanan di wilayah tersebut antara lain fasilitas pendidikan, fasilitas ekonomi dan fasilitas sosial budaya. Akibatnya masyarakat di kecamatan pedalaman melakukan perjalanan untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan di kecamatan pesisir serta melakukan transaksi jual beli di pasar-pasar induk yang lebih banyak berada di wilayah pesisir.

Perencanaan pengembangan kawasan pesisir dilakukan dengan cara menentukan prioritas-prioritas kawasan dan menumbuhkan sektor-sektor yang potensial di wilayah sesuai potensi sumber daya wilayah termasuk ketersediaan sarana dan prasarana wilayah. Perencanaan pengembangan kawasan pesisir perlu melibatkan para *stakeholder* serta memperhatikan aspek lingkungan dan depleksi sumber daya alam di wilayah pesisir dalam penetapan prioritas pengembangan kawasan pesisir sebagai dasar arahan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Jepara.

Perencanaan pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara juga perlu mempertimbangkan pergeseran kegiatan masyarakat pesisir dari kegiatan sektor primer (pertanian dan perikanan) dan sektor sekunder melalui industri pengolahan kayu ke sektor tersier yaitu industri jasa pariwisata berkembang di wilayah pesisir Kabupaten Jepara. Pergeseran pekerjaan nelayan dari menangkap ikan ke pemandu wisata dengan memanfaatkan kapal penangkap ikan sebagai kapal untuk tur wisata di kecamatan Karimunjawa serta ke sektor-sektor informal seperti warung makan, warung tenda yang menjual *seafood* dan toko souvenir di sekitar objek wisata pantai.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis tingkat perkembangan wilayah berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah; dan 2) menggali persepsi *stakeholder* mengenai pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara. Hasil penelitian ini diharapkan mampu merumuskan arahan pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara.

METODOLOGI

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5°43'20,67"- 6°47'25,83" Lintang Selatan dan 110°9'48,02"-110°9'37,40" Bujur Timur. Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2016.

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa kuesioner sedangkan data sekunder berupa data PODES Kabupaten Jepara tahun 2014. Kuesioner dilakukan untuk memperoleh persepsi *stakeholder* mengenai pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara. Responden terdiri atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara, akademisi dan pelaku usaha perikanan. Data PODES Kabupaten Jepara tahun 2014 yang didapat dari BPS.

Analisis Data

Analisis skalogram digunakan untuk melihat gambaran tingkat perkembangan suatu wilayah secara administratif dengan menggunakan kelengkapan sarana dan prasarana (infrastruktur) di wilayah tersebut. Wilayah yang menjadi objek penelitian ini adalah 16 kecamatan di Kabupaten Jepara. Analisis skalogram untuk melihat tingkat perkembangan wilayah digunakan dalam penelitian Syafi'i dan Santoso (2015), Utari (2015) dan Sadik (2016).

Peubah yang digunakan untuk analisis skalogram dalam penelitian ini adalah jarak desa ke ibu kota kecamatan, jarak antara pusat kecamatan dan ibukota kabupaten, data jumlah penduduk di tiap kecamatan. Data fasilitas yang

digunakan antara lain: sarana pendidikan (jumlah SD/MI, jumlah SMP/MTs, jumlah SMA/MA, dan jumlah akademi/ perguruan tinggi), data fasilitas keagamaan (masjid, surau, gereja, pura dan wihara), data sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan apotek), data fasilitas ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dan hotel) (Syafi'i dan Santoso 2015; Utari 2015; Sadik 2016). Data lain yang digunakan pada penelitian ini adalah prasarana dan sarana perikanan terdiri Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pabrik es.

Prosedur yang digunakan dalam penentuan perkembangan wilayah dengan menggunakan analisis skalogram adalah sebagai berikut:

- a. pemilihan terhadap data ketersediaan fasilitas pelayanan serta prasarana dan sarana perikanan yang tersedia di seluruh kecamatan se Kabupaten Jepara menggunakan data yang bersifat kuantitatif berdasarkan parameter yang relevan untuk digunakan.
- b. penjumlahan fasilitas pelayanan serta prasarana dan sarana perikanan pada tiap kecamatan, sehingga yang didapat adalah hirarki relatif kecamatan;
- c. memisahkan antara data jarak dan data jumlah fasilitas, hal ini karena antara data jarak dan jumlah fasilitas bersifat berbanding terbalik.
- d. merasionalisasi data jarak (aksesibilitas) dan fasilitas, data jarak diinverskan dengan rumus: $y = 1/x_{ij}$, dimana y adalah variabel baru dan x_{ij} adalah data jarak j di wilayah i . Nilai y yang tidak terdefiniskan ($x_{ij} = 0$), maka nilai y dicari dengan persamaan: $y = x_{ij} (max) + simpangan baku jarak j$. Kemudian data fasilitas diubah menjadi data kapasitas dengan cara jumlah fasilitas j di wilayah i dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah i .
- e. melakukan pembobotan terhadap data kapasitas dengan cara data kapasitas j dibagi dengan bobot fasilitas j , dimana bobot fasilitas $j = \text{jumlah total kapasitas } j \text{ dibagi dengan jumlah wilayah yang memilikifasilitas } j$.
- f. melakukan standarisasi data dilakukan terhadap variabel-variabel baru dari data

jarak dan fasilitas (berbobot) dengan menggunakan rumus:

$$y_{ij} = \frac{x_{ij} - \text{Min}(x_j)}{S_j}$$

dimana:

y_{ij} = variabel baru untuk wilayah ke-i dan jenis fasilitas atau jarak ke-j

x_{ij} = jumlah sarana untuk wilayah ke-i dan

jenis sarana atau jarak ke-j

$\text{Min}(x_j)$ = nilai minimum untuk jenis sarana atau jarak ke-j

S_j = simpangan baku untuk jenis sarana atau jarak ke-j

g. Indeks Perkembangan Wilayah (IPW) ditentukan dengan cara menghitung jumlah hasil standarisasi sarana dan aksesibilitas pada suatu wilayah. Penentuan hirarki wilayah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penentuan hirarki wilayah

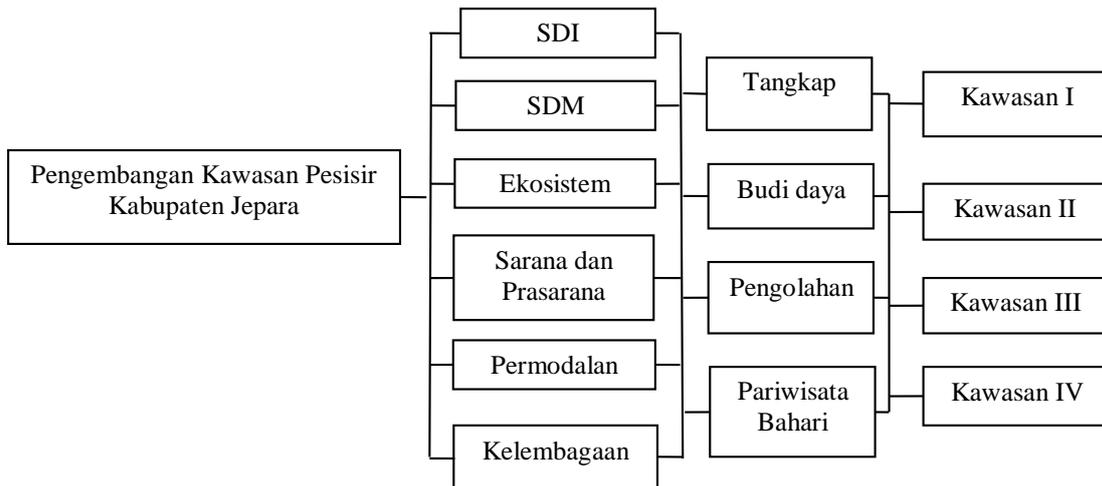
No.	Kelas	Nilai Selang	Tingkat Hirarki
1	Hirarki I	$X > [(\text{rataaan} + \text{St. Dev.}) \text{IPK}]$	Tinggi
2	Hirarki II	$\text{Rataan IPK} < X < \text{St. Dev. IPK}$	Sedang
3	Hirarki III	$X < \text{rataaan IPK}$	Rendah

Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menganalisis persepsi para *stakeholder* mengenai pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara. AHP merupakan aplikasi dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan banyak kriteria analisis dan penentuan prioritas strategi yang dimiliki pengambil keputusan yang dapat diimplementasikan pada semua bidang serta dapat dijadikan solusi dari sebuah konflik (Morano *et al.*, 2016; Ozdemir dan Saaty, 2006).

Kriteria yang dipakai dalam AHP adalah sumber daya ikan (SDI), sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha perikanan dan kelautan, sarana dan prasarana wilayah, keberlangsungan ekosistem pesisir dan laut, permodalan usaha perikanan dan kelautan serta kelembagaan. Alternatif pertama yang dibangun yaitu pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan di wilayah pesisir terdiri atas perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan hasil perikanan dan pariwisata bahari. Alternatif kedua yang dibangun yaitu pengembangan kawasan pesisir yang terbagi menjadi empat kawasan. Pembagian kawasan berdasarkan jumlah desa

pesisir dan kedekatan lokasi yang memberi kemudahan dalam pengawasan. Pembagian kawasan terdiri atas kawasan I (kecamatan Kedung dan kecamatan Tahunan), kawasan II (Kecamatan Jepara dan Kecamatan Mlonggo), kawasan III (Kecamatan Bangsri, Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling dan Kecamatan Donorojo) serta kawasan IV (Kecamatan Karimunjawa).

Pemilihan responden dilakukan terhadap pihak yang memiliki pemahaman baik terkait dengan pembangunan perikanan dan pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Jepara. Responden yang terpilih terdiri atas Bappeda Kabupaten Jepara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara, Akademisi, Camat wilayah pesisir dan pelaku usaha perikanan. Penyeleksian kriteria oleh pengambil keputusan tergantung dari tipe permasalahan masing-masing kriteria sedangkan perangkingan alternatif atau indikator dapat menggunakan studi literatur (Russo dan Camanho, 2015). Prioritas pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Jepara yang dibangun dalam AHP disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Prioritas pengembangan kawasan pesisir yang dibangun dalam AHP

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Perkembangan Wilayah Kabupaten Jepara

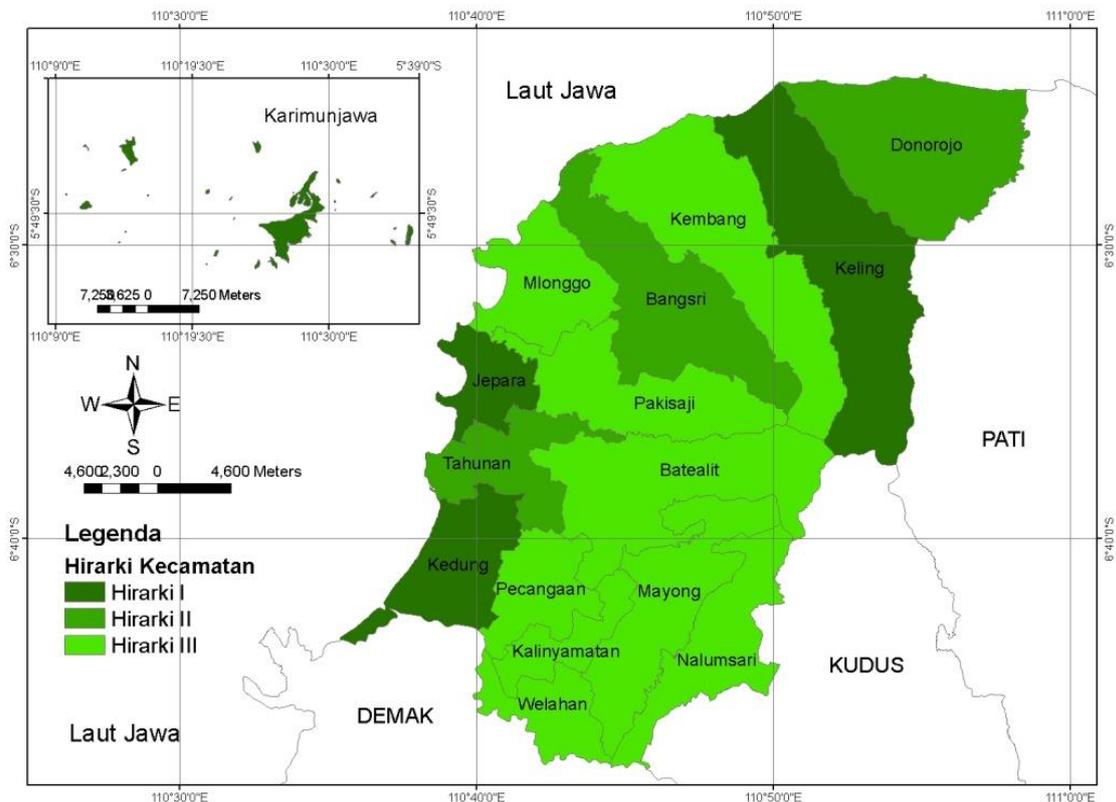
Hasil analisis menggunakan metode skalogram menunjukkan kisaran nilai Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) antara 31.80-85.65 (Tabel 2). Kecamatan yang mempunyai hirarki wilayah paling tinggi (hirarki I) adalah Kecamatan Kedung, Kecamatan Jepara, Kecamatan Keling dan Kecamatan Karimunjawa. Wilayah kecamatan hirarki II adalah Kecamatan Tahunan, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Donorojo. Tingkat pengembangan kecamatan rendah (hirarki III) yaitu Kecamatan Mayong, Kecamatan Welahan, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Pakis Aji, Kecamatan Batealit dan Kecamatan Kembang. Gambar 2 menyajikan hirarki kecamatan secara spasial.

Wilayah kecamatan yang memiliki tingkat perkembangan wilayah tinggi dan sedang di Kabupaten Jepara berada di kecamatan pesisir. Hal ini dikarenakan banyaknya penduduk yang tinggal di wilayah pesisir sehingga membutuhkan fasilitas pelayanan yang lebih bila dibandingkan dengan kecamatan pedalaman.

Wilayah pesisir Kabupaten Jepara juga menjadi pusat dari kegiatan perekonomian seperti kegiatan perdagangan, industri pengolahan, perikanan tangkap, perikanan budi daya, transportasi laut dan pariwisata bahari. Kecamatan Jepara sebagai ibukota kabupaten, merupakan wilayah kecamatan pesisir yang memiliki sarana dan prasarana yang paling lengkap dibandingkan dengan kecamatan pesisir lainnya, memiliki fasilitas pelayanan pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Fasilitas ekonomi pasar tradisional, toko, minimarket, pasar swalayan, hotel dan rumah makan. Fasilitas transportasi dan perhubungan terdapat terminal dan pelabuhan penyeberangan. Fasilitas pelayanan perkantoran pemerintah daerah juga terdapat di Kecamatan Jepara. Fasilitas penunjang kegiatan perikanan di Kecamatan Jepara antara lain 2 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan 1 Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), 1 unit pabrik es, 1 unit SPBN (stasiun pengisian bahan bakar nelayan) serta satu Balai Perikanan Budi daya Air Payau yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 2. Hasil analisis hirarki perkembangan wilayah kecamatan di Kabupaten Jepara

Kecamatan	Jumlah Penduduk	IPK	Jumlah jenis fasilitas dan aksesibilitas	Hirarki Wilayah
Karimunjawa	9,242	85.65	28	Hirarki I
Keling	61,541	69.36	41	Hirarki I
Kedung	76,683	67.13	39	Hirarki I
Jepara	87,822	66.01	44	Hirarki I
Tahunan	113,827	58.68	44	Hirarki II
Donorojo	55,388	48.55	33	Hirarki II
Bangsri	101,006	48.23	42	Hirarki II
Mayong	89,089	45.02	43	Hirarki III
Welahan	73,756	42.36	41	Hirarki III
Pakis Aji	60,019	42.23	37	Hirarki III
Nalumsari	73,078	38.69	39	Hirarki III
Kembang	69,104	38.57	35	Hirarki III
Kalinyamatan	63,782	37.81	38	Hirarki III
Batealit	84,832	37.13	35	Hirarki III
Pecangaan	83,847	32.47	38	Hirarki III
Mlonggo	85,273	31.80	37	Hirarki III



Gambar 2. Hirarki kecamatan di Kabupaten Jepara

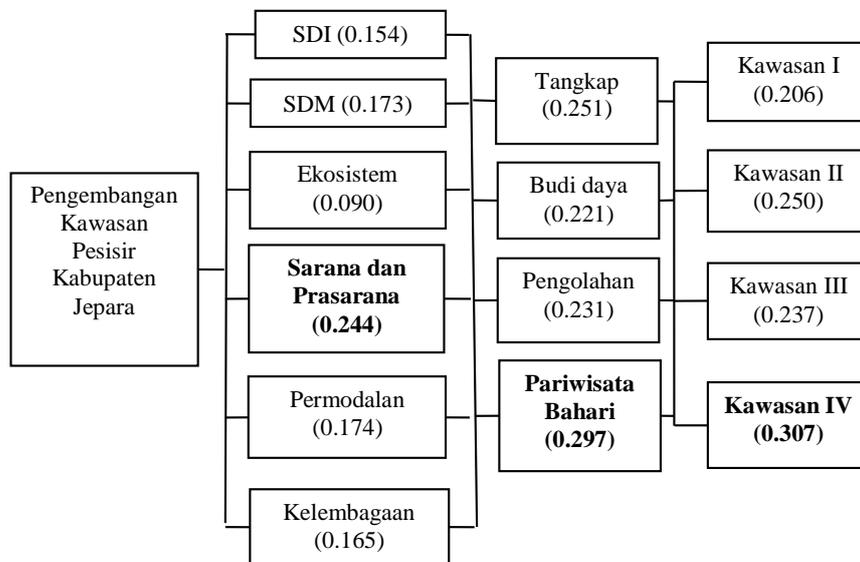
Prioritas Pengembangan Kawasan Pesisir Kabupaten Jepara

Persepsi *stakeholder* terhadap prioritas pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara tersaji pada Gambar 3. Persepsi *stakeholder* perikanan dan kelautan

menempatkan sarana prasarana sebagai kriteria utama dalam pengembangan kawasan pesisir (skor 0.244). Kecamatan Kedung, Kecamatan Jepara, Kecamatan Keling dan Kecamatan Karimunjawa merupakan kecamatan dengan tingkat perkembangan wilayah yang tinggi

(hirarki I) berdasarkan fasilitas yang dimilikinya. Pengembangan sarana prasarana pesisir perlu terlebih dahulu dilaksanakan guna mendorong perkembangan kegiatan di kawasan

pesisir dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan kelembagaan (Fajriah dan Mussadun, 2014).



Gambar 3. Alternatif pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara berdasarkan persepsi stakeholder

Kegiatan perikanan dan kelautan yang menjadi alternatif pengembangan di kawasan pesisir hasil analisis persepsi stakeholder menempatkan pariwisata bahari menjadi prioritas utama yang dikembangkan dengan skor 0.297. Pariwisata bahari merupakan kegiatan yang memanfaatkan jasa sumber daya pesisir dan laut melalui wisata pantai dan terumbu karang. Kecamatan Karimunjawa, Kecamatan Jepara dan Kecamatan Mlonggo merupakan wilayah yang telah mengembangkan pariwisata bahari secara komersial. Prioritas persepsi stakeholder menempatkan kawasan IV (Kecamatan Karimunjawa) skor tertinggi untuk dikembangkan (0.307). Kecamatan Karimunjawa mempunyai tingkat perkembangan wilayah yang tinggi (hirarki I) dan ketersediaan sumber daya alam pesisir dan laut yang masih terjaga kelestariannya.

Sarana dan prasarana sebagai prioritas utama kriteria pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara berdasarkan persepsi para stakeholder. Ketersediaan sarana dan prasarana yang paling banyak berdasarkan hasil analisis

skalogram menunjukkan Kecamatan Tahunan, Kecamatan Jepara, Kecamatan Mayong, Kecamatan Bangsri dan Kecamatan Welahan. Kecamatan Tahunan, Kecamatan Jepara dan Kecamatan Bangsri merupakan kecamatan yang terletak di wilayah pesisir.

Prioritas alternatif pengembangan kegiatan di kawasan pesisir melalui kegiatan pariwisata bahari. Kegiatan pariwisata bahari berkembang di wilayah kecamatan pesisir, antara lain Kecamatan Jepara, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Bangsri dan Kecamatan Karimunjawa melalui pengembangan wisata pantai. Sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang berkembang terdiri atas hotel, rumah makan, dan tourist information centre. Kecamatan Jepara menjadi wilayah paling lengkap dalam menyediakan sarana prasarana penunjang pariwisata dikarenakan di wilayah ini objek pariwisata pantai telah dikelola secara baik. Kecamatan Karimunjawa berkembang pariwisata bahari berupa wisata pantai, wisata budaya, wisata pancing dan wisata pesiar yang

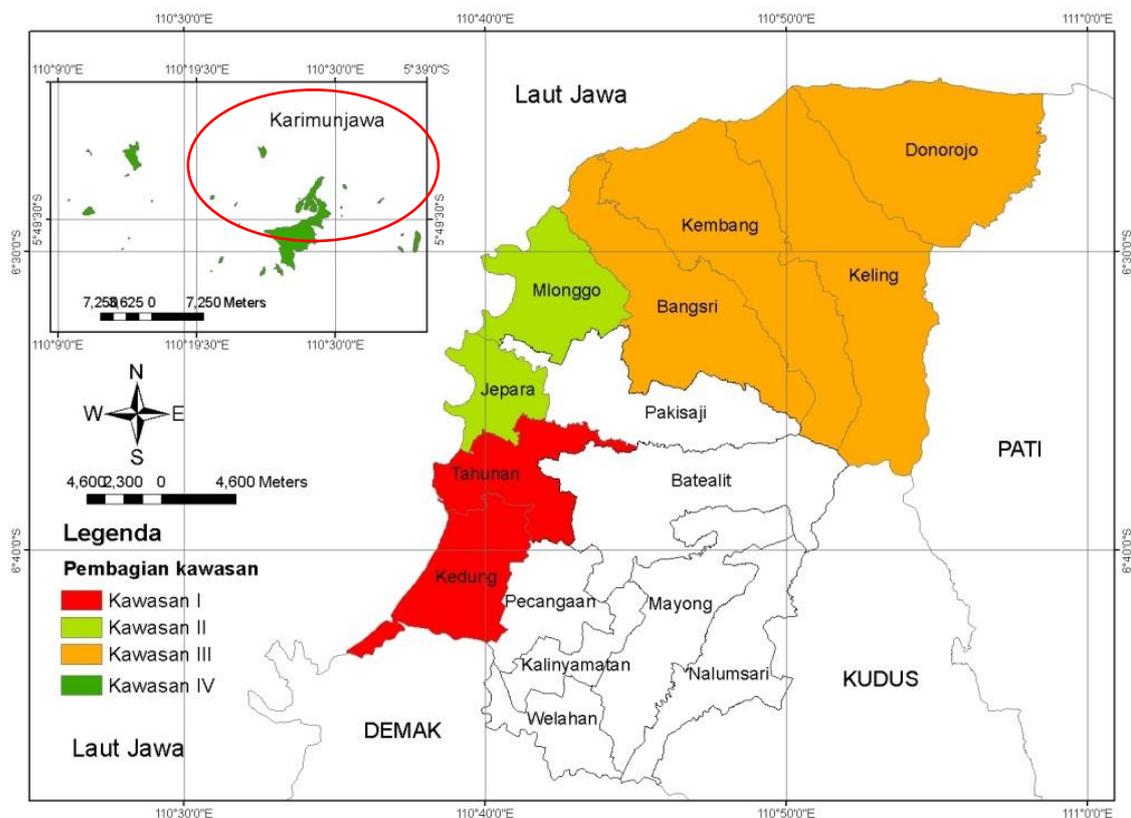
dikelola masyarakat lokal berupa tur menikmati keindahan pulau-pulau kecil dan ekosistem terumbu karang yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Fasilitas pendukung kegiatan pariwisata bahari yang telah dikembangkan berupa fasilitas hotel, *homestay*, rumah makan dan taman bermain. Perbaikan infrastruktur jalan sebagai akses ke tempat wisata, perbaikan sarana transportasi laut (pelabuhan) dan penambahan jam kapal penyeberangan ke Kecamatan Karimunjawa.

Pengembangan kawasan pesisir juga perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Salah satu infrastruktur pendukung sektor perikanan dan kelautan yaitu TPI. Keberadaan TPI dianggap penting bagi perekonomian wilayah Kabupaten Jepara sehingga pemerintah daerah meakukan upaya perbaikan fungsi TPI dengan memperbaiki fasilitas gedung TPI, melakukan pengerukan muara sungai untuk memperlancar arus kapal, membangun fasilitas *docking* dan kolam pelabuhan serta memperbaiki jalan produksi menuju TPI. Pemilihan lokasi yang tepat bagi pengembangan TPI di kawasan pesisir perlu dilakukan dengan menggunakan pertimbangan kedekatan sumber daya serta keberadaan sarana dan prasarana pendukung TPI (Astuti dan Viyetri, 2014). Fasilitas pendukung keberadaan TPI yang terdapat di Kabupaten Jepara antara lain pasar, SPBN, tempat senderan perahu, kantor pengelola TPI, serta sentra pengolahan ikan.

Alternatif pengembangan kawasan pesisir dalam penelitian ini yaitu: kawasan I (Kecamatan Kedung dan Kecamatan Tahunan),

kawasan II (Kecamatan Jepara dan Kecamatan Mlonggo), kawasan III (Kecamatan Bangsri, Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling dan Kecamatan Donorojo), serta kawasan IV Kecamatan Karimunjawa (Gambar 4). Kawasan IV menjadi prioritas wilayah pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara berdasarkan persepsi para *stakeholder* yaitu kecamatan Karimunjawa. Hasil analisis skalogram menunjukkan Kecamatan Karimunjawa memiliki tingkat perkembangan wilayah tinggi (hirarki I) berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah. Kegiatan pariwisata bahari juga berkembang di kecamatan ini. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata di kawasan pesisir yang tersedia berupa sarana hotel dan *homestay*, dua pelabuhan penyeberangan di Karimunjawa dan Kemujan serta satu bandara untuk pesawat terbang perintis.

Arahan pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara, berdasarkan sarana dan prasarana wilayah, diarahkan melalui pengembangan kegiatan pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas penunjang baik sarana dan prasarana pendukung pariwisata maupun infrastruktur jalan menuju ke objek wisata berupa sarana perhubungan darat dan perhubungan laut. Prioritas pengembangan kawasan pesisir berdasarkan persepsi *stakeholder* adalah kawasan IV yaitu Kecamatan Karimunjawa. Kecamatan Karimunjawa merupakan wilayah potensial bagi pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Jepara terutama melalui kegiatan pariwisata bahari (Gambar 4).



Gambar 4. Arah pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Jepara
Keterangan ○: arah pengembangan kawasan pesisir

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah merupakan salah satu syarat dalam pengembangan kawasan pesisir. Kecamatan pesisir yang mempunyai tingkat perkembangan wilayah yang cukup tinggi berdasarkan ketersediaan sarana prasarana wilayah adalah Kecamatan Kedung, Kecamatan Jepara, Kecamatan Keling dan Kecamatan Karimunjawa. Keempat kecamatan tersebut memiliki potensi pengembangan kawasan pesisir di wilayah Kabupaten Jepara. Kelengkapan fasilitas dan sarana pelayanan di kawasan pesisir akan mendorong kegiatan perekonomian serta mampu menarik investasi masuk di kawasan pesisir.

Pengembangan kawasan pesisir ke depan dititikberatkan pada pengembangan kegiatan potensial berdasarkan potensi lokal yang dimiliki. Pariwisata bahari merupakan salah potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara

dengan memanfaatkan jasa lingkungan pesisir. Kecamatan Karimunjawa, mempunyai hirarki wilayah I berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah, merupakan wilayah pengembangan kawasan pesisir berdasarkan potensi kegiatan pariwisata bahari.

Saran

Pemerintah daerah Kabupaten Jepara perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengembangan kawasan pesisir dan mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana wisata serta membangun kemudahan akses menuju ke Kecamatan Karimunjawa. Pemerintah daerah juga perlu melakukan promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga mendorong kegiatan perekonomian di Kecamatan Karimunjawa.

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir oleh pemerintah Kabupaten Jepara memerlukan keterlibatan *stakeholder* baik SKPD yang memangku kepentingan di wilayah pesisir maupun pelaku usaha yang berkegiatan di

wilayah pesisir. Program pemberdayaan masyarakat pesisir perlu untuk dilakukan guna mendukung keberhasilan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Jepara. Program pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan masyarakat pesisir dan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengawasan sumber daya alam pesisir sebagai modal pengembangan kawasan pesisir ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E.Y. (2011). Analisis Kemiskinan dan Pendapatan Keluarga Nelayan Kasus di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. *J. Dinamika Ekonomi Pembangunan*. 1 (1), 50-58.
- Alecsandru, S.V. & Raluca, D.A. (2015). A Regional Level Hierarchy of the Main Foreign Direct Investments' Determinants—Empirical Study, The Case of Romanian Manufacturing Sector. *Procedia Social and Behavioral Science. Eng.*, 181, 321–330.
- Adisasmita, R. (2008). Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arhipova, I. & Paura, L. (2015). Regional Development and Private Consumption Structure in Latvia. *Procedia Economics and Finance. Eng.*, 26, 86–91.
- Ariyanto, S. (2013). Kondisi Terkini Budidaya Ikan Bandeng di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. *Media Akuakultur*. 8 (2), 139-144.
- Astuti, K.D. & Viyetri, R. (2014). Lokasi Optimal Pengembangan TPI untuk mendukung Perkembangan Kawasan Pesisir Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Geoplanning: J. of Geomatics and Planning*. 1 (2), 85-92.
- Effendi, M. (2009). Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Kawasan Pesisir yang Optimal dan Berkelanjutan. *J. Kelautan*. 2 (1), 81-86.
- Fajriah, S.D. & Mussadun. (2014). Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Kawasan Pesisir Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. 10 (2), 218-233.
- Fanni, Z., Khakpour, B.A., & Heydari, A. (2014). Evaluating The Regional Development of Border Cities by TOPSIS Model (Case Study Sistan and Baluchistan Province Iran). *Sustainable Cities and Society. Eng.*, 10, 80–86.
- Fundeanu, D.D. (2015). Innovative Regional Cluster, Model of Tourism Development. *Procedia Economics and Finance. Eng.*, 23, 744–749.
- Harahab, N. (2010). Penilaian Ekonomi Hutan Mangrove dan Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Joesidawati, M. I. (2016). Penilaian Kerentanan Pantai di Wilayah Pesisir Kabupaten Tuban Terhadap Amcaman Kerusakan. *J. Kelautan*. 9 (2), 188-198.
- Kumalasari, N. R. (2014). Kapasitas Adaptasi Terhadap Kerentanan dan Bencana Perubahan Iklim di Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. 10 (4), 476-487.
- Luca, D. (2015). Votes and Regional Economic Growth: Evidence from Turkey. *World Development. Eng.*, 28, 477–495.
- Morano, P., Locurcio, M., & Tajani, F. Cultural Heritage Volarization: An Application of AHP for The Choice of The Highest and Best Use. *Procedia Social and Behavioral Sciences. Eng.*, 223, 952-959.
- Nugroho, I. & Dahuri, R. (2012). Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Penerbit LP3ES.
- Ozdemir, M.S. & Saaty, T.L. (2006). The unknown in decision making: What to do about it. *EJOR. Eng.*, 174, 349-359.
- Pramudyanto, B. (2014). Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir. *J. Lingkar Widya Swara*. 1 (4), 21-40.
- Permana, C.D. & Asmara, A. (2010). Analisis Peranan dan Dampak Investasi Infrastruktur Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Input–Output. *J. Manajemen dan Agribisnis*. 7 (7), 48–58.
- Redjeki, S. (2013). Komposisi dan Kelimpahan Ikan di Ekosistem Mangrove di Kedungmalang, Jepara. *J. Kelautan*. 18 (1), 54-60.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S. & Panuju, D.R. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Russo, R. & Camanho, R. (2015). Criteria in AHP: a Systematic Review of Literature. *Procedia Computer Science. Eng.*, 55, 123-1132.

- Sadik, J. (2016). Keragaan Relatif dan Karakteristik Perkembangan Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. *Media Trend*. 11 (1), 20-34.
- Syafi'I, R.A. & Santoso, E.B. (2015). Identifikasi Kemampuan Pelayanan Ekonomi dan Aksesibilitas Pusat Kegiatan Lokal Ngasem di Kabupaten Kediri. *J. Teknik ITS*. 4 (1), 17-21.
- Utari, E.S. (2015). Analisis Sistem Pusat Pelayanan Pemukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2014. *JEJAK*. 8 (1), 62-72.
- Waluyo, A. (2014). Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Secara Terpadu yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Pulau Raas Sumenep Madura). *J. Kelautan*. 7 (2), 75-85.
- Zikra, M. (2009). Kegiatan Survey Lapangan Untuk Inventarisasi Permasalahan Kerusakan Pesisir Pantai di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *J. Kelautan*. 2 (1), 20-26.